

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah terdiri dari dua kata yaitu otonomi dan daerah. Otonomi berasal dari bahasa Yunani “*autos*” yang berarti sendiri dan “*nomos*” yang berarti hukum dan aturan. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas tertentu. Sehingga otonomi daerah dapat diartikan sebagai suatu kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat maupun kepentingan untuk mengurus daerahnya sendiri (Encyclopedia Britannica, 2015).

Penerapan sistem otonomi daerah di Indonesia, ditandai dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan adanya Penerapan otonomi daerah ini pemerintahan daerah diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan masyarakat, mengembangkan kehidupan berdemokrasi, meningkatkan keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah, memelihara hubungan pemerintahan pusat dan daerah serta mendorong pemberdayaan masyarakat (Safitri:2016).

Ketentuan pasal 18 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa “Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut Azas Otonomi daerah yang meliputi azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas

perbantuan. Ketiga azas tersebut haruslah dipegang teguh dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Azas-azas tersebut sangatlah penting terutama dalam pemberian ruang bagi pemerintahan daerah untuk mengurus sendiri pemerintahannya tanpa ada campur tangan dari pemerintahan pusat

Pemberian ruang bagi pemerintahan daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya, terkhusus dalam hal mendorong perekonomian daerah yang berkaitan dengan mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah dalam hal penerimaan kas daerah melalui pendapatan daerah dan menekan pengeluaran kas daerah melalui belanja daerah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mampu meminimalisir penyimpangan yang dapat mempengaruhi jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah harus dilaksanakan secara nyata dan bertanggung jawab (Safitri:2016).

Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten dari sembilan belas kabupaten/kota di Sumatera Barat atau salah satu dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang melaksanakan sistem otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Pemerintahan Kabupaten Solok terdiri dari 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan perangkat daerah pengguna anggaran, yang memiliki tugas dan fungsi tertentu untuk mendukung Kabupaten Solok dalam membangun daerah dan mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah (*solokkab.go.id*)

Badan Keuangan Daerah (BKD) merupakan salah satu SKPD yang dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok No. 8 Tahun 2016

tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok Memiliki fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, dan aset daerah baik dalam pengelolaan atau penatausahaan pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Solok. Karena pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu yang sangat strategis dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah maka penulis merasa tertarik untuk mempelajari pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, didalam tugas akhir dengan judul, “ **Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok** “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan dan prosedur sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah Pemerintahan Kabupaten Solok pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok.
2. Apa saja risiko yang terdapat dalam sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah Pemerintahan Kabupaten Solok pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok.

3. Bagaimana pengendalian internal yang telah diterapkan guna meminimalisir terjadinya risiko yang terdapat dalam sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah Pemerintahan Kabupaten Solok pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dijelaskan tujuan penulisan tugas akhir ini, di antaranya adalah :

1. Untuk memahami bagaimana penerapan dan prosedur sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah Pemerintahan Kabupaten Solok pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui apa saja risiko yang terdapat dalam sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah Pemerintahan Kabupaten Solok pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok.
3. Untuk memahami pengendalian internal yang dapat diterapkan guna menyikapi risiko yang terdapat dalam sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah Pemerintahan Kabupaten Solok pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok.

1.4 Manfaat Penulisan

Berikut adalah manfaat dari penulisan tugas akhir ini dikategorikan kepada pihak-pihak tertentu, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1.4.1 Untuk Mahasiswa

1. Untuk menjadi substansi pokok tugas akhir yang nantinya akan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya program study DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan tentang Sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah pada Pemerintahan Kabupaten Solok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok.
3. Untuk mengetahui prosedur penerimaan dan pengeluaran kas daerah pemerintahan Kabupaten Solok serta pengendalian internal yang mencakup proses tersebut secara keseluruhan melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok.

1.4.2 Untuk Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

Diharapkan nantinya hasil dari penulisan ini dapat dijadikan sebagai acuan tugas akhir serta capaian sasaran pembelajaran pada masa yang akan datang terkhusus di bidang sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah.

1.4.3 Untuk Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok

Sebagai bahan masukan atau saran serta evaluasi bagi pihak Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok atas sistem yang telah diterapkan dimasa lampau, sehingga dapat menjadi pertimbangan pengambilan keputusan demi keberlangsungan instansi dimasa yang akan datang.

1.4.4 Untuk Pembaca

Sebagai Media informasi atau referensi bagi pihak yang juga ingin melakukan penelitian atau pembahasan lebih lanjut mengenai sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah pada instansi pemerintahan ataupun tempat yang sama disamping sebagai bahan bacaan guna menambah ilmu pengetahuan pembaca.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan penulisan yang baik dan terarah maka penulisan tugas akhir ini dibagi dalam beberapa bab yang membahas hal-hal berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kegiatan , tempat dan waktu magang serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang berbagai referensi atau tinjauan pustaka yang mendukung kajian yang penulis sampaikan, yang berisikan tentang pengertian sistem akuntansi, pengertian sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, pengertian sistem pengendalian internal dan proses pengendalian internal pergerakan kas (Penerimaan dan Pengeluaran Kas).

BAB III : GAMBARAN UMUM BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) KABUPATEN SOLOK

Membahas tentang gambaran umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok, visi dan misi, uraian tugas dan struktur organisasi serta aktivitas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas data dari informasi penelitian yang dianalisis, ditafsirkan sehingga kita dapat mengetahui bagaimana data hasil penelitian apakah dapat menjawab permasalahan dengan

tujuan pembahasan dalam landasan teori yang dijelaskan sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok dan mahasiswa yang akan melaksanakan praktek kerja atau magang.

